



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI OGAN
KOMERING ULU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI OGAN
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 29 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020

PEMOHON

- Prendi Alhafiz (Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021)
- Yasin Hidayat (Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu
- KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 29 Januari 2021, Pukul 13.40 WIB – 14.27 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Arief Hidayat
- 2) Manahan MP. Sitompul
- 3) Saldi Isra

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Rizki Amalia
Siska Yosephin Sirait**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021:

Yasin Hidayat

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Prengki Adiatmo
2. M. Sigit Muhaimin

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021:

Fadrianto T. H.

D. Termohon Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021:

Jaka Irhamka

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021:

Rivaldi Alwi

F. Termohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021:

Ade Putera Marthabaya

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021:

Sofhuan Yusfiansyah

H. Bawaslu:

1. Anggi Yumarta (Kab. Ogan Komering Ulu)
2. Sigit Yuares (Kab. Ogan Komering Ulu Selatan)

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Turiman
2. Saiful Mizan

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Junaidi Albab Setiawan
2. Dessy Fitrianty

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mulai. Bismillahirrahmanirahim. Sidang dalam Perkara 08/PHP.BUP-XIX/2021 dan 33/PHP.BUP-XIX/2021 dengan ini terbuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum saya minta memperkenalkan diri yang hadir, perlu saya sampaikan bahwa dalam persidangan di Mahkamah dalam rangka penyelesaian perkara Pilkada 2021, berlaku dua protokol. Satu, PMK yang mengatur mengenai tata cara persidangan penyelesaian sengketa Pilkada. Dan yang kedua, protokol kesehatan, ya.

Ini yang berkaitan dengan PMK, Saudara-Saudara dianggap sudah tahu karena seharusnya yang beracara di Mahkamah sudah tahu mengenai peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Yang kedua, berkenaan dengan protokol kesehatan. Jadi, semua yang hadir di sini harus melalui pemeriksaan antigen ... rapid antigen yang dinyatakan negatif, ya, sehingga kalau ada yang tidak memenuhi syarat, tidak boleh masuk di persidangan ini.

Kemudian, yang hadir di sini secara fisik, di ruang ini, sangat dibatasi, sehingga masing-masing pihak hanya maksimal dua orang yang hadir. Oleh karena itu, ya, selebihnya yang hadir, Para Pihak dari ... Para Pihak, artinya ada kuasa hukum yang lebih dari dua atau prinsipal, bisa hadir melalui daring, ya, dan daring sudah juga dicek, kita lihat di layar monitor itu kelihatan yang daring juga sudah hadir, ya, dan bisa mendengar kami ... suara kami dengan sebaik-baiknya karena memang menggunakan media yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian yang kedua, masalah ... tidak hanya masalah fisik orang yang terbatas, itu juga masalah yang berhubungan dengan durasi persidangannya. Sesuai dengan protokol kesehatan, dalam satu pertemuan itu tidak boleh melebihi dari waktu tertentu yang ditetapkan oleh protokol kesehatan. Kita diagendakan dalam persidangan ini juga dibatasi.

Oleh karena itu, dalam persidangan ini pembicaraan tidak dilakukan secara bertele-tele, tapi dilakukan secara efektif, efisien menggunakan waktu, sehingga nanti yang berbicara hanya secukupnya dan dilakukan pokok-pokoknya saja. Dapat dipelajari dokumen-dokumen yang sudah tertulis, baik itu Permohonan, keterangan, jawaban dari Para Pihak, serta bukti-buktinya yang diajukan secara tertulis bisa di akses dan bisa dipelajari. Jadi yang penting itu, ya. Jadi, pembicaraan sangat terbatas dan akan dipandu oleh Hakim, sehingga mencapai sasaran.

Jadi, pembatasan atau penetapan itu dilakukan dengan tidak mengurangi kepastian hukum dan tidak mengurangi rasa keadilan. Kita akan mendengar seluruhnya secara ... apa ... cermat dan semuanya mempunyai kesempatan yang sama, dibatasi oleh aturan-aturan yang kita tetapkan itu.

Baik, silakan memperkenalkan diri Pemohon Perkara 08/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir? Silakan. Siapa yang akan bicara?

2. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: RIVALDI ALWI

Izin, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia. Izin.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan. Siapa?

4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: RIVALDI ALWI

Ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon lho. Jangan Pihak Termohon itu. Anda kan Termohon, kan? Nah, Pemohon. Semua nanti dapat memperkenalkan diri.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya. Terima kasih waktunya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Perkenalkan kami dari Kantor Hukum JLO (Jagok Law Office) sebagai Pemohon dari Prendi Alhafiz dari Barisan Pemantau Pemilu. Di sini saya bersama ... nama saya Prengki Adiatmo, S.H., dan saat ini saya ditemani rekan saya, Muhammad Sigit Muhaimin, S.H.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi ini bukan ... Prinsipal bukan pihak calon, tapi pemantau pemilu, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Anda Kuasa Hukum dari pemantau pemilu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Pemohon Perkara 33/PHP.BUP-XIX/2021.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Perkenalkan saya Fadrianto T. H., dari Kantor Hukum Fadrianto T. H., S.H., and Law Firm, Kuasa Hukum dari Prinsipal, yakni pemantau pemilu, Saudara Yasin Hidayat. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian Termohon Perkara 08/PHP.BUP-XIX/2021?

18. KUASA HUKUM TERMOHON 08/PHP.BUP-XIX/2021: RIVALDI ALWI

Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. Perkenalkan saya Rivaldi Alwi, S,H. Berkantor hukum di SHS Law Firm (Sofhuan Yusfiansyah Law Firm) dalam hal ini saya mendampingi Termohon sebagai Kuasa Hukum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang dihadiri langsung oleh Prinsipal salah satu Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Saudara Jaka.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

20. KUASA HUKUM TERMOHON 08/PHP.BUP-XIX/2021: RIVALDI ALWI

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Termohon Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021!

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: SOFHUAN YUSFIANSYAH

Yang Mulia. Bismillahirrahmannirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir. Izinkan kami memperkenalkan diri, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: SOFHUAN YUSFIANSYAH

Kami dari Kuasa Hukum KPU Ogan Komering Ulu Selatan. Saya sendiri Sofhuan Yusfiansyah, S.H. Didampingi Prinsipal kami, dihadiri langsung oleh Ketua KPU OKU Selatan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu Pekara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021! Dari Ogan Komering Ulu, siapa?

26. BAWASLU: ANGGI YUMARTA (KAB. OGAN KOMERING ULU)

Mohon izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmannirrahim, Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Anggi Yumarta, S.I.P., M.I.P. Saya Koordinator Sesi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini mewakili Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekian, terima kasih.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu Nomor Perkara 33/PHP.BUP-XIX/2021!

28. BAWASLU: SIGIT YUARES (KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN)

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Sigit Yuares dari Bawaslu Kabupaten OKU Selatan selaku Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, sekian.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Calon Pihak Terkait Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: TURIMAN

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: TURIMAN

Hari ini dalam kesempatan ini kami hadir Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Tunggal Drs. Kuryana Azis dan Johan Anwar. Saya Turiman, S.H., dan rekan saya Saiful Mizan, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pihak Terkait Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021!

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: JUNAIDI ALBAB SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Calon Tunggal dari Kabupaten OKU Selatan, Popo Ali Martopo dan Sholehein Abuasir. Nama saya Junaidi Albab Setiawan, S.H., ... Dr. ... dan Dessy Fitrianty. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Jadi untuk sementara sebelum disahkan Permohonan Anda sebagai Pihak Terkait, itu Anda sementara masih duduk di luar persidangan, tapi sebagai pengunjung yang bisa juga mendengarkan seluruh rangkaian persidangan ini. Tapi setelah disahkan pada akhir persidangan ini, Saudara untuk di sidang yang kedua sudah bisa duduk di depan situ, ya. Jadi sementara masih sebagai Calon Pihak Terkait. Ini baru diteliti keabsahannya, apakah bisa menjadi Pihak Terkait atau tidak, ya.

Baik, sesuai dengan apa yang saya sampaikan itu, kita berbicara yang efisien, ya, tidak bertele-tele, sehingga kita bisa memangkas durasi pertemuan ini. Karena durasi yang terlalu lama juga sangat berbahaya, bisa menjadi cluster baru dalam penyebaran Covid-19, ya.

Baik, sekarang saya akan minta langsung saya anu ... untuk Pekara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, ya. Pekara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 berarti di dalam Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu, calon tunggal, ya? Betul, Termohon? Calon tunggal? Pemantau pemilu yang menjadi Pihak Pemohon, apakah saudara mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh KPU?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Punya, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Punya? Ada, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ada.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilampirkan sebagai bukti, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ada, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilampirkan sebagai bukti?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Buktinya bukti P berapa itu nanti? Supaya dicek nanti.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Siap.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada? Bukti P berapa? Bukti P ... P-2 ini?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya, Bukti P-2, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada ... ada AD/ART? Pemantau pemilunya punya AD/ART?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Punya, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ada.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kalau ada di ... belum jadi bukti, ya. Nanti dilampirkan sebagai bukti, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada enggak? Kalau ada tambahan alat bukti diserahkan sekarang, sebelum persidangan ini berakhir, tambahan alat bukti diserahkan sekarang, ya. Nanti kalau diserahkan setelah persidangan dianggap tidak ada tambahan alat bukti, ya. Jadi ini Kepaniteraan sudah melaporkan tidak ada AD/ART-nya, yang ada adalah bukti mendapat sertifikat dari (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Sertifikat.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU, ya. Baik. Kemudian Anda mengajukan Permohonan ini kapan? Ini Kuasa Hukum kan yang membuat Permohonan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

15 Desember, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal berapa?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Tanggal 15 Desember.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Permohonannya? Tanggal berapa? KPU sama KPU itu ... Termohon itu menetapkan rekapitulasi dan pengumuman hasil rekapitulasinya kapan itu? Tanggal berapa menetapkannya? KPU kapan menetapkan? Ya, ini yang anu ... gitu lho, yang ... apa ... Prinsipalnya enggak hafal? Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 yang kita sekarang bicarakan. Kuasa Hukunya dan KPU Prinsipalnya, silakan, kapan ini Anda menetapkan hasil rekapitulasi yang kemudian diumumkan? Perkara 08/PHP.BUP-XIX/2021, siapa ini Kuasanya? Prinsipalnya siapa? Ya, kapan itu? Menetapkan kok enggak tahu.

Ya, ini persidangan ini kan persidangan kita butuh bukti-bukti yang konkret, masa kebangetan ini, bagaimana ini? Anda menghadiri persidangan mestinya harus persiapan. Kuasa Hukumnya itu pemantau juga harus ... anu dong. Gimana dalam persidangan kayak begini. Yang memerlukan waktu yang lama begini ini.

60. TERMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: JAKA IRHAMKA

15 Desember, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

62. TERMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: JAKA IRHAMKA

15 Desember.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

15 Desember di tetapkan? Betul ya, 15 Desember. Anda ajukannya 15 Desember atau kapan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

16 Desember satu hari setelah.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam catatan kami Permohonan diajukan pada tanggal 17 Desember, pukul 17.40 WIB yang betul yang mana? Ha?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

17 Desember, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi 16 Desember.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Sekitar jam 17.00 WIB.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana? Ha? Gimana? Nomor perkaranya, Nomor Perkara 8/PHP.BUP-XIX/2021 lho kamu? Kuasa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Gimana ini? Ini kan mengajukan ... mengajukan sendiri, Kuasa Hukumnya kan mestinya kan harus tahu persis. Ya, catatan kami Anda mengajukan tanggal 17. Anda mengajukan Perbaikan Permohonan? Gimana? Aduh.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Izin, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Perbaikan Permohonan hari Rabu, tanggal 30 Desember.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Hari Rabu, tanggal 30 Desember. Ketentuannya gimana? Anda boleh mengajukan Perbaikan Permohonan? Permohonan awal diajukan 17 Desember, sekarang perbaikannya tanggal 30 Desember. Masih berlaku enggak perbaikannya ini? Baca PMK-nya, enggak?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Peraturan Mahkamah Konstitusi mengatakan gimana, perbaikan permohonan diperbolehkan sampai kapan? Ada batas waktunya, enggak?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Tiga hari, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga hari. Mengajukan tanggal pertama tanggal 17.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

He em.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus sekarang perbaikannya tanggal 30, masih berlaku tenggang waktunya enggak? Ha? Gimana itu? Tiga hari. Kalau dari tanggal 17, tiga hari itu kapan? Hari kerja hanya dihitung hari kerja. Gimana? Berarti Anda lewat tenggang waktu. Kalau lewat tenggang waktu, perbaikannya tidak berlaku, ya.

Termohon jadi yang dipakai pada permohonan Perkara 08/PHP.BUP-XIX/2021 adalah Permohonan awal, ya. Jadi yang dibacakan adalah Permohonan awal. Itu Pihak Terkait juga harus tahu. Kemudian Bawaslu juga harus tahu, ya.

Lah, ini beracara begini kasihan yang diwakili. Ayo, kita teruskan. Selisih antara ... sekarang saya tanya, selisih antara kotak kosong dengan perolehan suara Pihak Terkait berapa selisihnya?

Ya sudah, Anda enggak bisa, nanti kita cari sendiri, tadi coba ... sekarang kenapa mengajukan Permohonan ini, Kuasa Perkara 08/PHP.BUP-XIX/2021? Dalil-dalil yang Anda ajukan kenapa mengajukan Permohonan ini?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Karena menurut hemat kami, kami mengajukan Permohonan ini dengan alasan salah satunya, yakni (...)

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan salah satu. Dalil-dalil semua dibacakan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Baik. Pokok-pokok Permohonan kami, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Yang satu ... yang pertama bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Nama Pasangan Nomor 1, kolom kosong, perolehan suara 63.166. Nomor 2 nama Pasangan Calon Drs. H.

Kuryana Azis dan Drs. Johan Anwar, S.H., M.M., dengan perolehan suara=116.778. Dengan total keseluruhan suara=176.944.

Poin yang kedua. Bahwa hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak sah karena diduga perolehan suara yang didapat di TPS dikarenakan money politics yang terjadi di setiap TPS.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Hal ini (...)

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan dibacakan seluruhnya!

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti dalil yang kedua, adanya money politics.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Money politics.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Money politics, di mana? Saya pandu saja. Money politics-nya di mana itu dilakukan?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Izin, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Money politics-nya terjadi di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelaku terdiri dari 2 orang, inisial SL dan SE, atas perintah Lurah Sukajadi.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu sudah dilaporkan ke Bawaslu, diproses di Gakkumdu, money politics?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Sudah dilaporkan dan sudah diproses oleh Bawaslu OKU.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, sampai di mana prosesnya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Tidak ... tidak ditemukan apa ... pelanggaran, Bapak.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ditemukan pelanggaran? Nah, ya, kalau sudah enggak ditemukan pelanggaran. Nanti, Bawaslu, betul enggak itu nanti, ya?

Terus dalil yang berikutnya, apa? Anda di sini saya pandu, tinggal Anda mengatakan ya atau tidak.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Ya.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon rekapitulasinya salah, betul?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Betul, Yang Mulia.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mulai dari tingkat TPS. TPS di mana itu? Hingga ke rekapitulasi di tingkat kabupaten ada kesalahan rekapitulasi, gitu, ya, betul?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Betul, Yang Mulia.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nanti direspons, KPU.

Terus, kemudian yang ketiga. Banyak pemilih yang tidak terdaftar di DPT, menggunakan hak pilihnya, betul?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Betul, Yang Mulia.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul? Itu di mana, bisa menunjukkan daerahnya? Apa di seluruh kabupaten atau hanya di TPS tertentu? Ada di kecamatan tertentu atau di desa tertentu?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Dalam ... izin, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Dalam alat bukti yang kami laporkan di awal (...)

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Itu sudah ada foto nama-nama DPT orang yang sudah tidak bisa dimasukkan dalam DPT, namun tetap dalam ... terdaftar dalam DPT.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu itu di bukti P berapa?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

P-3, Yang Mulia.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-3? Ya, betul P-3? Baik, kalau begitu P-3.

Terus kemudian, Anda mendalilkan DPT yang digunakan tidak akurat, betul?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Benar, Yang Mulia.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang dimaksud tidak akurat?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Jadi, yang seharusnya tidak mempunyai hak untuk memberikan suaranya, di sini dia bisa memberikan suaranya, Yang Mulia.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, DPT itu kan ada proses?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Ya.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

DPT sementara, kemudian DPT-nya dibetulkan, ya, setelah itu ditandatangani oleh semua, termasuk pemantau ikut enggak menandatangani DPT-nya juga dulu? Enggak masalah, ya, tadi, ya? Nanti tolong, apakah ada pembaharuan DPT? Nanti dijawab. Tidak sekarang, jawabannya nanti di jawaban Termohon, ya.

Sekarang terakhir, dalilnya adanya pelanggaran kecurangan yang TSM. Apa yang dimaksud dengan, "Di dalam Permohonan ini, pelanggaran, kecurangan yang bersifat TSM." Itu dilakukan oleh siapa?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Izin, Yang Mulia, boleh saya menjawab. Jadi, pasangan yang dihadapi ini adalah Pihak Terkait adalah seorang petahana, Yang Mulia.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, petahana. Petahana, dalam hal ini kalau petahananya enggak ngapa-ngapain bisa saja?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

He em.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini apa? Dia melakukan kecurangan, pelanggaran?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Kami duga dengan ... dengan seperti contoh, Yang Mulia, terdapat Saksi Pasangan Nomor Urut 2, itu ada RT, Yang Mulia.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh. RT kenapa?

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Jadi, dia masuk dalam saksi pasangan calon.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, pak RT menjadi pasangan calon?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Dan yang kedua, ada instruksi dari lurah, ada videonya, membagikan ... menginstruksikan untuk membagikan money politics. Jadi, dengan (...)

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak, kalau masalah money politics, itu kan harus diikuti dengan laporan. Ada enggak laporannya?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Sudah ada, Yang Mulia.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada laporan ke Bawaslu?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Ya.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus Bawaslu, sudah diproses apa belum?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Bisa dijawab nanti oleh Bawaslu, Yang Mulia.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, enggak. Saya tanya dugaan Anda, Anda mendalilkan, kan mestinya tahu. Lah, kalau mendalilkan enggak tahu, kan berarti lempar batu sembunyi tangan ini.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Ya, Yang Mulia.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tahu enggak kalau itu sudah dilaporkan ke Bawaslu, siapa yang melaporkan?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Dari tim kotak kosong, Yang Mulia.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tim kuasa?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Dari (...)

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemantau?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Dari masyarakat.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masyarakat. Terus habis itu, Anda kalau itu diproses Bawaslu?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Sudah tahu, Yang Mulia.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tahu diproses Bawaslu. Kemudian akhir dari proses itu, gimana?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Tidak dapat ini ... tidak ditemukan pelanggaran.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ditemukan, ya. Nanti, Bawaslu, benar enggak itu? Kalau tidak ada kesalahan, kan berarti tidak ada money politics itu.

Ya, itu dalil yang terakhir berkenaan dengan keikutsertaan RT dan kepala desa yang membagikan money politics. Baik.

Ada lagi dalil yang lain? Sepertinya di catatan saya ... membaca Permohonan Anda enggak ada lagi. Ha?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Cukup, Yang Mulia.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof. Saldi!

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.
Saudara Kuasa Pemohon, Anda baca enggak PMK Nomor 6 Tahun 2020?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Baca, Yang Mulia.

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa ... khusus menyangkut dengan Pemohon yang berkenaan dengan pemantau pemilu? Baca, ya?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya, Yang Mulia.

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa kira-kira yang Anda baca di situ?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Salah satunya bahwasanya tim pemantau pemilu diberikan kewenangan untuk mengajukan keberatan.

161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa lagi? Oke, nanti dibaca lagi, ya!

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Siap, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang pertama. Yang kedua ... mohon maaf, Pak Ketua.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini di ... sebelum Anda bacakan Petitem, nanti kan ... kalau ini Petitem ... Petitem angka 3 itu Anda minta pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang? Tahu bedanya enggak pemilihan ulang dengan pemungutan suara ulang, Mas ... apa ... Mas Prengki?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Kalau pemilihan, berarti mengadakan pemilu ulang.

167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mengadakan pemilu ulang.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Ya.

169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau pemungutan suara ulang?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Berarti pe ... apa namanya ... suara yang sudah direkap kemarin itu diadakan per ... perhitungan ulang.

171. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, Prof. Saldi?

173. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, cukup, Prof, cukup.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sam ... sambil ditegaskan, diterangkan, Prof.

175. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini coba ... anu ... ini gimana ini (...)

177. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau pemungutan suara ulang, hanya pemungutan suara saja yang diulang, ya. Tapi kalau pemilu ulang, itu dari awal tahapannya.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Seluruh proses.

179. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Nah, saya untuk memastikan saja. Yang Saudara minta itu pemungutan suara ulang, walaupun tertulis di sini *pemungutan suara ulang*. Atau Anda inginnya pemilu ulang. Nah, setelah saya jelaskan, yang Anda inginkan pemungutan suara ulang atau pemilu ... pemilihan ulang?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Izin, Yang Mulia.

181. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Sesuai dengan Petitumnya, kami pemungutan suara ulang.

183. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hanya pemungutan suara ulang?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: M. SIGIT MUHAIMIN

Ya.

186. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Coba sekarang dibacakan Petitumnya! Ya, ini meskipun di sini, kan Anda harus belajar juga. Silakan!

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 13.30 WIB.

Poin ketiga. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, yaitu sebanyak 725 TPS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Poin keempat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedadil-adilnya. Terima kasih banyak.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Ya, Yang Mulia, ada? Silakan! Nanti Prof. Saldi kalau masih ada, silakan!

190. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Yang Mulia Pak Manahan!

192. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia.
Kepada Pemohon, ya, Kuasanya, Prengki Adiatmo, ya?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Siap.

194. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tadi sudah disinggung tentang Kedudukan Hukum, ya. Yang memberikan kuasa kepada Saudara ini, kan hanya Prendi Alhafiz?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Siap, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kedudukannya sebagai ketua. Nah, tadi sudah disuruh membaca itu PKPU ... apa ... kita ... PMK kita itu, nanti di sana Saudara bisa lihat, apakah memang Saudara Prendi Alhafiz ini yang berhak untuk memberi kuasa kepada Saudara sendiri atau harus dengan jabatan yang lain. Oleh karena itu, diperlukanlah anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang

tadi itu ... yang harusnya hari ini juga sudah disampaikan kepada persidangan ini. Karena hal itu nanti yang bisa menentukan, apakah Permohonan ini yang oleh Rendy Azis ... saya ulangi, Prendi Alhafiz yang mengajukannya. Apa itu dia berwenang atau tidak? Nah, ini hanya sekadar untuk menegaskan yang telah dikemukakan Prof. Saldi tadi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Gitu, ya?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Siap, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih, Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021.

Sekarang kita Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021. Baik, Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021, saya mulai. Anda mengajukan Permohonan ini, kapan? Tanggal 18, ya?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Terima kasih, Yang Mulia. Tanggal 18 Desember 2020.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Anda mengajukan Perbaikan Permohonan, kapan?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Tanggal 30 Desember 2020.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

30 Desember. Kalau begitu, Perbaikan Permohonannya menurut PMK masih berlaku atau tidak?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Tidak lagi, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak. Berarti Anda yang bacakan perbaikan ... anu ... Permohonan awal, ya?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Ya.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, perolehan suaranya, gimana? Pemenang atau Pihak Terkait, perolehan suaranya berapa?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Perolehan suara pasangan tunggal atau Nomor Urut 1, Popo Ali Martopo B. Commerce dan Sholehain Abuasir, S.P., M.Si., adalah 210.702 dengan (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, kotak kosong yang tidak memilih?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Kotak kosong=8.417, Yang Mulia.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Selisihnya berapa itu?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Tidak sampai 1%, Yang Mulia.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau ... ya. Jadi, selisihnya 202.285, ya?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Ya.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang dalil-dalil Saudara, kenapa mengajukan Permohonan ini? Apa yang dilakukan, baik oleh Termohon, kesalahan Termohon itu, menurut Anda apa ... menurut Pemohon pemantau? Oh, ya, juga ... Anda itu juga pemantau, ya?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Ya, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada AD/ART-nya ada? Anda punya sertifikat?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Sertifikat ada, Yang Mulia. AD/ART tidak termasuk di dalam alat bukti.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, tidak ada di dalam alat bukti?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Tidak.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawa enggak AD/ART-nya?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Maaf, Yang Mulia, tidak dibawa.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak, kalau begitu, itu ada Prinsipal, kan sebelah Anda?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Ada, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana, Yang Mulia? Silakan, Yang Mulia, silakan!

226. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini Saudara Yasin Hidayat, ya?

227. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Siap, Yang Mulia.

228. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul, ya? Saudara sebagai ketua, ya?

229. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Siap, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, Saudara itu organisasinya ini pemantau pemilu ... barisan, ya? Barisan Pemantau Pemilu di Ogan Kemering (...)

231. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Komering Ulu Selatan, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ogan Komering Ulu Selatan, ya?

233. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Siap.

234. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu sekretaris jenderal nya, ada?

235. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Ada, Yang Mulia.

236. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada?

237. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Ada, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, di anggaran dasar/anggaran rumah tangga itu, bagaimana ketentuannya kalau ada masalah-masalah hukum, masalah yang harus diurus ke pengadilan itu? Siapa yang berwenang untuk mengadakan organisasi?

239. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Siap, ketua.

240. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sendiri? Ketua?

241. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Sendiri, ketua.

242. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, di anggaran dasar ... anggaran dasar itu atau anggaran rumah tangga itu, tertera seperti itu?

243. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Siap, benar.

244. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi, itu tidak bisa diserahkan hari ini?

245. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Enggak bisa, Majelis.

246. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Wah. Nah, ini kepentingan Saudara, ya, kita menyarankan. Kalau itu, nanti kita tidak tahu, Saudara ini punya legal standing atau tidak.

247. PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: YASIN HIDAYAT

Siap.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, menurut Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, pemohon pemantau harus ditandatangani oleh ketua dan sekjen atau sebutan lain. Kalau itu tidak sesuai dengan ... apa ... tidak sesuai dengan Pasal 9, apabila ditentukan oleh AD/ART-nya. Makanya, AD/ART-nya itu dianggap penting untuk diketahui supaya kita bisa menilai, apakah Anda punya legal standing atau tidak, begitu lho. Ini dua-duanya itu sangat penting, ya. Harusnya itu tahu persis karena Anda harus membaca PMK ini, Pasal 9 ini, ya.

Baik. Sekarang dalil-dalilnya. Nanti masalah itu, nanti terserah mau direspons KPU atau Pihak Terkait, "Oh, berarti enggak punya legal standing." Juga terserah kayak apa itu." Nanti kita yang menilai.

Baik. Dalilnya, apa? Kok Anda tetap mengajukan selisih suaranya banyak?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, didasarkan kepada rekapitulasi yang salah ... yang salah, yaitu sejak dilaksanakan di setiap tahapan penghitungan suara, baik dari perhitungan di TPS sampai akhirnya rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota. Disebabkan tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan perolehan suara, sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mengatur tentang (...)

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan itu.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Siap.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang contohnya itu, gimana sih? Kalau menurut Pemohon, yang benar itu, gimana sih? Penghitungan suara di tingkat TPS itu, gimana? Yang benar itu caranya, gimana? Anda tahu? Atau Prinsipal tahu? Kok bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon itu salah, tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 (...)

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Menurut hemat kami, penghitungan suara yang benar, itu dilakukan di tempat yang terbuka.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Kemudian saksi dari setiap pasangan, kotak kosong, maupun pasangan calon, itu harus ada saksi yang menyaksikan proses penghitungan suara secara terbuka, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemantau pemilu punya saksi di seluruh TPS di Ogan Komering Ulu, ya? Ogan Komering Ulu Selatan. Punya?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Pemantau Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak memiliki saksi di setiap TPS-TPS yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada ... tidak ada saksi. Tapi, ada yang ada saksinya?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Ada.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu yang terjadi kayak begitu di yang ada saksinya atau yang tidak ada saksinya?

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Di yang ada saksinya, Yang Mulia.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, yang ada saksinya. Ya, nanti KPU merespons, ya? Benar apa enggak. Terus, dalil yang berikutnya?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Dalil yang berikutnya, Yang Mulia, mohon izin. Bahwa masih banyak pemilih yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh Termohon, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini di dalam keputusan yang ditetapkan oleh Termohon tentang (...)

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan itu. Jadi, ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Pada waktu proses pembaharuan DPT, ya. Pembaharuan atau apa ... istilahnya apa, KPU? Jadi, ada DPT sementara, terus kemudian menjadi DPT tetap, itu prosesnya apa namanya?

267. TERMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: ADE PUTERA MARTHABAYA

Pemutakhiran data pemilih, Yang Mulia.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Apa namanya?

269. TERMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: ADE PUTERA MARTHABAYA

Pemutakhiran data pemilih.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemutakhiran data pemilih. Lah, itu Anda pemantau ikut dalam rangka pemutakhiran data atau tidak?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Izin, Yang Mulia. Dalam rangka pemutakhiran data pemilih atau dari DPS ke DPT, kita ikut memantau. Tapi yang menjadi sorotan kita, Yang Mulia, itu antara selisih suara atau selisih mata pilih, Pileg 2019 dengan Pilkada 2020 itu memiliki selisih suara atau selisih DPT=9.000 kurang-lebih, Yang Mulia. Ini dalam rangka ... jangka satu tahun (...)

272. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Maaf, Pak Ketua.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

274. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hai, yang ditanya Ketua Panel saja! Anda ditanya tadi, Anda ikut ndak ketika apa itu (...)

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemutakhiran.

276. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pemutakhiran data itu?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pemutakhiran, kita memantau, Yang Mulia.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ikut memantau? Oke, pemantaunya di mana pada waktu penetapan? Jadi, kalau tidak salah, ya ... KPU, ini saya minta konfirmasi.

Pada waktu pemutakhiran akhir, pasangan calon tanda tangan, kan? Tapi pemantau tanda tangan juga, enggak?

279. TERMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: ADE PUTERA MARTHABAYA

Tidak, Yang Mulia.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemantau tidak ada, ya? Jadi, yang tanda tangan hanya peserta pemilu, ya?

281. TERMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: ADE PUTERA MARTHABAYA

He eh, partai Politik.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Terus dalil yang berikutnya, apa?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Bahwa masih terdapat pemilih yang sudah tidak dapat menggunakan haknya, yaitu seperti meninggal, pindah alamat, maupun alih status, masih terdapat dalam daftar pemilih tetap.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu jelas itu dalilnya, ya, nanti direspons oleh KPU. Jadi, dia sudah pindah ke lain kabupaten, atau lain provinsi, atau sudah mati, tapi dianggap masih memilih, mencoblos. Terus, dalil berikutnya?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, tadi sudah rekapitulasi. Kan tadi penghitungan suara tadi sampai ke tingkat kabupaten tidak sesuai dengan PKPU. Terus, apa lagi?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Bahwa untuk menjamin terciptanya demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dikarenakan tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak transparan di dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara di setiap tahapan rekapitulasi, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, itu anu ... itu sudah Petitum. Dalil dulu. Ada dalil lain lagi?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Cukup, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Sekarang Petitum berarti. Ya, silakan, Petitumnya, apa?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt.1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.57 WIB.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, yaitu sebanyak 893 TPS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Terima kasih.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Ada, Yang Mulia Pak Manahan? Prof. Saldi?

Baik, ini masalah pengesahan alat bukti, ya. Anda supaya lebih fair, itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya untuk segera bisa diserahkan, ya, untuk kita ngecek, betul apakah pemantau pemilu ini sudah betul diwakili siapa, ya? Supaya kita bisa menentukan secara cermat.

Untuk Pemohon Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021, ada enggak AD/ART-nya?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Kami tanya terlebih dahulu, Yang Mulia.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu untuk melengkapi buktinya, ya. Anda sudah membawa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, tapi itu mestinya juga ada lampirannya AD/ART, ya?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

AD/ART.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begitu juga untuk Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Karena sudah ada sertifikatnya, mestinya itu sudah dilampiri AD/ART-nya, ya. Karena sertifikat itu mestinya dilampiri AD/ART, ya. Tapi karena belum ada, sebetulnya itu bisa diajukan karena proses persidangan masih menghadirkan nanti bukti-bukti dari para pihak, ya. Untuk segera dilakukan secepat-cepatnya, ya, sebelum penundaan sidang ini sudah

disampaikan kepada Mahkamah, ya. Karena itu hanya sebe ... sebetulnya suplemen dari sertifikat yang disahkan.

Nah, sekarang sebelumnya saya tanya ke KPU. Betul, pemantau ini sudah disahkan oleh KPU dan mendapat sertifikat?

299. TERMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: ADE PUTERA MARTHABAYA

Betul, Yang Mulia.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Nah, pada waktu Anda membuat sertifikat, berarti ada AD/ART-nya kan? Menilai, enggak, ada AD/ART-nya?

301. TERMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: ADE PUTERA MARTHABAYA

Secara administrasi, Yang Mulia, pemantau pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini sudah memenuhi syarat. Jadi (...)

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah memenuhi syarat? Berarti kan AD/ART-nya juga dong mestinya, sudah dilihat toh?

303. TERMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: ADE PUTERA MARTHABAYA

Kemungkinan dalam ... apa namanya itu ... RK pembentukan (...)

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu, ya. Nanti dilampirkan, itu kan suplemen dari Anda sudah disahkan sebagai Pemantau, sehingga sebetulnya ada AD/ART-nya.

Nah, sekarang ini kita hanya melihat apakah ... untuk mengecek, apakah betul sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konsitusi yang ada di Pasal 9 tadi, ya. Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, ya. Bisa disusulkan segera.

Ya baik, ini sementara Saudara mengajukan P-1 sampai dengan P-4, tapi harus dilengkapi AD/ART-nya, ya. Begitu juga Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-2, betul? Nah, itu suplemennya berupa AD/ART harus dilengkapi segera.

Jadi, Anda bisa telepon ke sana untuk segera di-email ke sini, ya. Nanti bisa segera disampaikan ke Kepaniteraan, gitu, ya. Ya, sanggup, ya?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Izin, Yang Mulia.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

AD/ART dari Prinsipal ada, tapi dalam bentuk file, Yang Mulia.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu bisa nanti di sini kita kan punya ... itu ... untuk nge-print out, ya, kan? Ada di situ, ya.

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021: FADRIANTO T. H.

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa ada fasilitas itu. Untuk nge-fax ke sini juga ada fasilitas, supaya di-fax ke sini, ya. Nanti Anda melapor ke Kepaniteraan supaya bisa difasilitasi. Terima itu, ya. Baik, ini buktinya, Bukti Perkara PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021, P-1 sampai dengan P-4, betul?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: PRENGKI ADIATMO

Betul, Yang Mulia.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Dengan catatan suplemennya, lampirannya berupa AD/ART ditambahkan, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Begitu juga Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 P-1 sampai dengan P-2, betul? Nanti suplemennya atau lampirannya berupa AD/ART ditambahkan, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, yang kedua. Ada Dua Pihak ... Permohonan Pihak Terkait. Yang pertama, Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 itu Drs. Kuryana dan Johan Anwar mengajukan menjadi Pihak Terkait. Dan kemudian Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 Saudara Popo dan Saudara Solehein, betul? Dua-duanya betul, ya?

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHP.BUP-XIX/2021: TURIMAN

Betul, Yang Mulia.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, disahkan untuk menjadi Pihak Terkait.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang terakhir, penundaan sidang. Penundaan sidang untuk Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021, Selasa, 9 Februari, pukul 08.00 WIB. Jadi, pukul 08.00 WIB, Selasa, 9 Februari.

Kemudian, untuk Perkara yang Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021, Selasa, 9 Februari, sama tanggal dan harinya, tapi jamnya berbeda, pukulnya 11.00 WIB.

Agendanya mendengarkan jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan mendengarkan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti dari Saudara-Saudara. Kalau alat buktinya banyak, ya, bisa diserahkan sehari sebelumnya, sebelum sidang untuk supaya bisa dilakukan sterilisasi, tapi kalau hanya tambahan, jumlahnya sedikit bisa disterilisasi di bawah dan dibawa ke persidangan.

Baik, sebelum saya tutup ada ada yang akan disampaikan Para Pihak? Cukup? Sudah dimengerti? Baik, kalau begitu. Prof, ada tambahan? Yang Mulia, ada? Cukup.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 29 Januari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

